



• NUSABALI/SUDIRTA

Perbekel Pucaksari, Nyoman Dharma

Gerbangsadu Rp 1 Miliar Bermasalah **BUMDes Pucaksari Terpaksa Dibekukan**

SINGARAJA, NusaBali
Dana Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Bali Mandara sebesar Rp 1,020 miliar di Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Buleleng bermasalah. Pihak desa pun terpaksa membekukan seluruh bidang usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat. Informasi di lapangan, Desa Pucaksari yang berada di perbatasan Kabupaten Buleleng-Kabupaten Tabanan-Kabu-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

BUMDes Pucaksari Terpaksa Dibekukan

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

paten Jembrana mendapat kucuran dana Gerbangsadu sebesar Rp 1,020 miliar dari Pemprov Bali tahun 2012. Dana Gerbangsadu---program yang diperuntukkan buat desa dengan tingkat kemiskinan di atas 35 persen---ini dikucurkan untuk mempercepat akselerasi pengentasan kemiskinan di Desa Pucaksari.

Dana Gerbangsadu itu kemudian dikelola melalui BUMDes Pucaksari, dengan dua bidang usaha, yakni Simpan Pinjam dan Toserba (Toko Serba Ada). Kedua bidang usaha itu mendapat modal awal masing-masing Rp 400 juta yang bersumber dari dana Gerbangsadu. Sedangkan sisa dana Gerbangsadu sebesar Rp 200 juta digunakan untuk pembangunan fisik Gedung BUMDes dan Rp 20 juta lagi dipakai operasional.

Awalnya, kedua bidang usaha ini berjalan normal. Tapi, setelah berjalan 4 tahun, ternyata banyak kejanggalan dalam pengelolaan. Pengurus BUMDes diduga membuat laporan fiktif, karena antara pertanggungjawaban dengan fakta yang ada di lapangan tidak sesuai. Banyak barang dagangan dalam usaha Toserba tidak jelas. Demikian juga dengan usaha Simpan Pinjam, banyak kredit macet.

Muncul kecurigaan, ada

pengurus yang ikut memakai dana BUMDes. Bahkan, dana sebesar Rp 30 juta yang tersimpan dalam brankas sempat dikabarkan hilang. Menyusul kondisi tersebut, pihak Desa Pucaksari kemudian terpaksa membekukan seluruh kegiatan BUMDes, sampai pengurus membuat pertanggungjawaban pengelolaan dana. Namun, hingga awal Maret 2018 ini, permasalahan itu tidak kunjung menemukan solusi.

Kepala Desa (Perbekel) Pucaksari, I Nyoman Dharma, membenarkan pengelolaan dana Gerbangsadu Mandara yang bermasalah. Perbekel Nyoman Dharma mengakui seluruh kegiatan BUMDes telah dibekukan, akibat tidak jelasnya pertanggungjawaban pengelolaan dana Gerbangsadu.

"Pembekuan BUMDes itu atas saran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) Provinsi Bali, karena kami sudah melaporkan persoalan ini," ungkap Perbekel Nyoman Dharma saay dikonfirmasi NusaBali di ruang kerjanya di Kantor Desa Pucaksari, Rabu (7/3).

Nyoman Dharma menjelaskan, sejak muncul kecurigaan ada yang tidak beres dalam pengelolaan BUMDes yang sumber dananya dari Gerbangsadu, pihaknya bersama tokoh masyarakat berusaha meny-

lesaikan masalah ini. Dari hasil penelusuran, diketahui jumlah dana yang tidak jelas cukup banyak.

Menurut Dharma, usaha Toserba, jumlah kerugian mencapai Rp 140 juta. Sedangkan untuk usaha Simpan Pinjam, kerugiannya bahkan mencapai Rp 249 juta, karena banyak kredit macet. "Dari penelusuran itu, ada pengurus yang ikut memakai dana. Dan, itu sudah diakui. Pengurus bersangkutan juga sudah membuat surat pernyataan, tapi sampai saat ini belum punya itikad untuk menyelesaikannya," papar Dharma.

Dalam surat pernyataan itu, kata Dharma, pengurus yang menjabat sebagai Ketua BUMDes Pucaksari, Nyoman Jinarka, mengakui memakai dana sekitar Rp 77 juta. Dari jumlah itu, baru Rp 30 juta yang telah dikembalikan, sedangkan sisanya sebesar Rp 47 juta dijanjikan akan dilunasi September 2017 lalu.

"Nyatanya, sampai sekarang belum dibayar. Kami sudah mengundang yang bersangkutan empat kali, bahkan ke Provinsi Bali juga. Tapi yang bersangkutan tidak pernah hadir," katanya. Terkait persoalan itu, Dharma selaku Perbekel Pucaksari berencana membentuk tim guna menyelematkan dana-dana tersebut, sambil berkoordinasi dengan Dinas PMD Provinsi Bali. **k19**

Edisi : Kamis, 8 Maret 2018

Hal : 1 dan 15



Bupati Giri Prasta Sampaikan LKPJ Tahun 2017

MANGUPURA, NusaBali

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2017, dalam rapat paripurna DPRD Badung, Rabu (7/3). Hadir dalam rapat paripurna itu Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, dan segenap kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata beserta dua wakilnya, I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta.

Dalam pidatonya Bupati Giri Prasta menyampaikan, pihaknya telah menyerahkan seluruh dokumen LKPJ Bupati Badung tahun 2017 pada 1 Maret lalu berdasarkan surat Nomor 050/1243/SEKRET/BAPPEDA. LKPJ tersebut sebagai gambaran implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama satu tahun, yang bertema 'Memperkuat Kemandirian Daerah melalui Inovasi dan Pengelolaan Potensi dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah'.

Ada 9 prioritas pembangunan daerah, meliputi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kesehatan; pembangunan ekonomi; penataan ruang dan lingkungan hidup; sarana dan prasarana wilayah, perumahan dan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender; serta pariwisata, pertanian, dan kebudayaan.

Terkait tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, Pemkab Badung telah melaksanakan ber-

bagai pendidikan dan pelatihan serta kursus untuk meningkatkan kualitas SDM. Sedangkan di bidang pelayanan publik, salah satunya dilakukan pembinaan kepada 16 penyelenggara layanan publik. Termasuk melakukan survei kepuasan masyarakat dan pengembangan pelayanan berbasis online.

Di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemkab Badung mengalokasikan anggaran pendidikan mencapai 20,08 persen dari total belanja APBD. "Juga dilaksanakan studi kelayakan pengembangan green house di Kabupaten Badung dengan capaian di atas 90 persen, pemasangan 183 CCTV, dan pembangunan Badung Command Centre dan Badung Data Centre," paparnya.

Di bidang kesehatan, Pemkab Badung menyelenggarakan layanan jaminan kesehatan Krama Basung Sehat (KBS), layanan kesehatan di rumah (home care), dan sebagainya.

Di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mencapai 6,79 persen.

Di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup, Pemkab Badung melaksanakan 36 paket kegiatan, meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang dengan alokasi dana Rp 40 miliar lebih. "Salah satunya ada program pembangunan taman, penanganan sampah, dan pengadaan bibit tanaman upakara 'Taman Bumi Banten Giri Lestari di Desa Sulangai, Petang,' ujarnya.

Terkait sarana prasarana wilayah, perumahan dan permukiman, Pemkab Badung melakukan pembangunan jalan dan jembatan, jalan lingkungan, penyediaan air bersih,

Edisi : Kamis, 8 Maret 2018

Hal : 2



Sambungan . . .



• IST
BUPATI I Nyoman Giri Prasta menyerahkan penjelasan LKPJ Bupati Badung tahun 2017, Rabu (7/3), di Gedung DPRD Badung.

perumahan untuk 625 RTS, dan permukiman. Terkait ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Pemkab Badung menggendeng pihak terkait dalam program Sistem Pengamanan Terpadu (SIPAMANPADU) dan patroli keamanan dan ketertiban umum. Juga diberdayakan tim reaksi cepat (TRC) dalam penanggulangan bencana.

Di bidang perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender, Pemkab Badung melaksanakan program perlindungan dan layanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Termasuk penyerahan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berjumlah Rp 15 juta kepada 625 RTS. "Sementara, komitmen pengarusutamaan gender membawa indeks pembangunan gender pada capaian 75,51 persen pada tahun 2017," ujarnya.

Terakhir, bidang pariwisata, Pemkab Badung gencar mempromosikan pariwisata ke pasar internasional. Di bidang pertanian, dilakukan sub-

sidi benih, pembinaan petani, penguatan subak, optimalisasi ternak sapi Sobangan, dan pemberdayaan nelayan. Sedangkan, di bidang kebudayaan, Pemkab Badung mendorong optimalisasi peran lembaga adat serta sekaa tradisional. Termasuk renovasi pura, pelaksanaan even berskala internasional. Hal ini dikemas dalam program pengembangan nilai budaya dan pengelolaan kekayaan budaya.

Dari program-program tersebut, pendapatan daerah tahun 2017 mencapai Rp 4.937.606.912.412,09, belanja Rp 5.412.294.132.028,13, dan pembiayaan Rp 1.075.636.185.996,97.

Pada kesempatan tersebut sekaligus membahas beberapa Ranperda, satu di antaranya adalah Ranperda Inisiatif tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ranperda inisiatif Dewan tersebut dijabarkan langsung oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah I Nyoman Oka Widyanta SH, MH. @ asa



Dewan Badung Proses PAW Made Wijaya

MANGUPURA, NusaBali

Pergantian antar waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung I Made Wijaya alias Yonda yang tersandung masalah hukum, kini mulai bergulir. Bahkan partai Gerindra selaku partai politisi asal Tanjung Benoa, Kuta Selatan itu, sudah mengusulkan resmi ke lembaga dewan untuk proses PAW-nya.

Tak ayal, wakil rakyat di Sempidi kini tengah menggodok PAW Yonda sebagai anggota DPRD Badung. Kabar-nya, Badan Kehormatan (BK) Dewan sudah melaksanakan rapat dan memutuskan untuk memberhentikan politisi yang tersandung kasus reklamasi liar dan pembabatan hutan di Pantai Barat Tanjung Benoa, Kuta Selatan.

Menurut informasi, alasan BK menyetujui pencopotan Yonda dengan melihat pertimbangan sebagai berikut. Pertama, yang bersangkutan diancam pidana dengan hukuman antara 5-15 tahun, kemudian dengan vonis 1 tahun penjara. Kedua, karena dipenjara Yonda sudah tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota Dewan. Ketiga, induk partai yang bersangkutan juga sudah secara resmi mengusulkan PAW. Keempat, karena kena sanksi fisik penjara setahun dan diusulkan PAW, maka sesuai tata tertib (Tatib)



I Made Wijaya alias Yonda

• DOK NUSABALI

DPRD yang bersangkutan wajib diberhentikan.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata saat dikonfirmasi membenarkan sudah ada usulan PAW untuk anggota Made Wijaya. Bahkan juga diakui, pergantian anggota ini sudah berproses. "Iya, ada usulan PAW. Sekarang sedang berproses," ujarnya ditemui usai rapat paripurna DPRD Badung, Rabu (7/3) kemarin.

Parwata memastikan proses PAW akan segera dilakukan apabila persyaratannya sudah terpenuhi. "Karena sudah ada usulan dari induk partainya, jadi segera akan dilakukan," tegas politisi asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara itu.

Walau begitu, Parwata be-

lum bisa memastikan kapan akan dilakukan PAW. Dia berbalasan saat ini lembaga masih melakukan proses pembahasan. "Yang jelas segera," tandasnya.

Pada bagian lain, Sekretaris DPC Partai Gerindra Badung I Nyoman Sentana mengakui partainya sudah mengusulkan PAW untuk Made Wijaya dari keanggotaan DPRD Badung. "Iya, sudah ada usulan (PAW Made Wijaya, red)," akunya.

Pertimbangan PAW diambil karena saat ini yang bersangkutan tidak lagi bisa melaksanakan kewajibannya sebagai anggota Dewan. "Sesuai Tatib, anggota Dewan bisa diganti apabila berhalangan tetap, meninggal dunia dan ditarik

induk partainya. Nah, dalam kasus Yonda ini semua unsur itu terpenuhi," tegas Sentana.

Disinggung siapa pengganti Yonda, Sentana menyebut salah satu nama yakni Wayan Suweta. Tetapi, tentu saja pihaknya tetap akan melakukan koordinasi lebih lanjut kepada KPU Badung, sebab pihak penyelenggara pemilu yang tahu betul mengenai hal ini.

Seperti diketahui, kasus ini berawal dari temuan Forum Peduli Mangrove (FPM) Bali

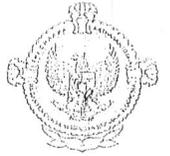
terkait adanya reklamasi liar di pesisir barat pantai Tanjung Benoa. Lantaran kawasan tersebut merupakan lahan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) I Gusti Ngurah Rai, FPM Bali lalu melaporkan kasus tersebut ke Mapolda Bali. Wijaya selaku Bendesa Adat Tanjung Benoa mengaku memberikan surat kuasa kepada beberapa orang warganya untuk melakukan reklamasi liar itu, termasuk penebangan pohon mangrove

sebagai akses jalan kendaraan proyek menuju pantai. Setelah dilakukan penyelidikan selama 4 bulan, polisi akhirnya menetapkan Wijaya sebagai tersangka.

Selain itu, lima orang lainnya yang ikut membantu pembabatan hutan mangrove dan menimbun pasir juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu I Made Marna, I Made Mentra, I Ketut Sukada, I Made Suarta dan I Made Widnyana. **asa**

Edisi : Kamis, 8 Maret 2018

Hal : 16



Mantan PPL Distan Gianyar Divonis 2 Tahun 4 Bulan



• DOK NUSABALI

Terdakwa Mantan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Dinas Pertanian Gianyar Suartana didampingi kuasa hukumnya di Pengadilan Tipikor Denpasar.

DENPASAR, NusaBali

Mantan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Dinas Pertanian Gianyar, Dewa Putu Suartana, 41 divonis 2 tahun 4 bulan oleh Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (7/3). Suartana terbukti melakukan korupsi dana bantuan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) di Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sari Lestari, Tulikup, Gianyar senilai Rp 76 juta.

Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim pimpinan I Wayan Sukanila menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor sesuai dakwaan subsidair penuntut umum.

Setelah membacakan hal memberatkan dan meringankan, majelis hakim membacakan

putusan kepada terdakwa. "Menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan empat bulan dikurangi masa penahanan," tegas Sukanila.

Hukuman ini ditambah denda Rp 1 miliar atau bisa diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Terdakwa asal Banjar Kesian, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar juga diwajibkan mengganti kerugian negara Rp 1 miliar. "Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama satu bulan," lanjut hakim.

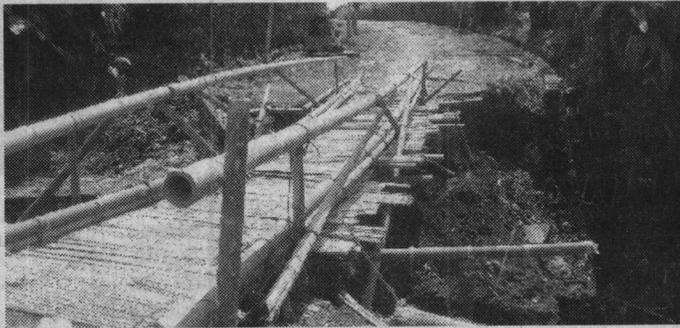
Atas putusan tersebut, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, Made Suryawan menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama dinyatakan JPU Gede Ari yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 3,5 tahun penjara. "Saya pikir-pikir," tegasnya. **rez**

Edisi : Kamis, 8 Maret 2018

Hal : 5



Jembatan Baturiti Dianggarkan Rp 2,4 Miliar



Kondisi jembatan dari bambu pasca putus di di Banjar Pekarangan, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Jumat (10/3).

TABANAN, NusaBali

Jembatan yang putus pada Februari 2018 di Banjar Pekarangan, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Tabanan akan diperbaiki Juni 2018. Anggarannya pun sudah disiapkan sekitar Rp 2,4 miliar lebih. Detail Engineering Design (DED) proyek ini dalam pengerjaan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Pe-

rumahan dan Kawasan Pemukiman (PURP) Tabanan I Made Yudiana mengatakan, jembatan tersebut sebelumnya rusak dengan panjang 12 meter dan tinggi 5 meter. Jembatan penghubung antar Banjar Baturiti Kaja, Desa Baturiti dengan Banjar Titigalar, Desa Bangli, Tabanan. "Jembatan rusak karena diterjang air di bawah jembatan," ujarnya.

Kaya Yudiana, pembangunan jembatan ini akan dilakukan tahun 2018 dengan anggaran Rp 2,4 miliar lebih dengan kontrak pelaksanaan fisik mulai Juni 2018. "DED sedang dikerjakan dan akan berakhir pada Maret 2018," tegasnya. Kini jembatan tersebut masih bersifat darurat, terbuat dari bambu atas gotong royong masyarakat. Jembatan ini juga jadi jalan alternatif untuk dua desa tersebut saat warga mengangkut hasil tani terutama sayur mayur yang dijual ke Pasar Sayur Baturiti, Tabanan.

Salah seorang warga setempat I Wayan Artika, 45, menginginkan agar jembatan baru bisa dibuat. Masalahnya jembatan yang roboh akibat luapan air sungai dan kini jadi jembatan darurat, hanya bisa dilalui kendaraan roda dua dan pejalan kaki. "Jika kendaraan roda empat sudah tak bisa lewat," ujarnya. d

Edisi : Sabtu, 10 Maret 2018

Hal : 7



Total Aset PPI Sangsit Rp 14,6 Miliar ★ Pemkab Siap Serahterimakan ke Provinsi

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng telah menghitung keseluruhan aset yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Desa Sangsit, Keamatan Sawan. Penghitungan itu menyusul pengalihan aset ke Pemprov Bali. Pengalihan itu akan memastikan penanganan kerusakan dermaga yang ambruk sebagian akibat diterjang ombak beberapa tahun lalu.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng Ni Made Arnika usai menghadiri kegiatan Gelar Keagamaan di lapangan umum Taman Kota Singaraja Jumat (9/3) mengatakan, sejatinya pelimpahan aset di PPI Sangsit sudah siap dilakukan karena nilai aset sudah dihitung oleh tim aset. Dari hasil penghitungan, total asetnya tercatat sebesar Rp

14,6 miliar. "Tim juga melengkapi dokumen tentang kondisi riil aset yang ada di PPI," katanya.

Diakui, dari dokumen ada fasilitas dengan kondisinya rusak ringan, sedang dan berat. Salah satu kerusakan berat adalah dermaga PPI yang putus, karena ambruk diterjang gelombang pasang. Selain itu, unit penjualan bahan bakar khusus nelayan atau disebut dengan istilah SPDN, pengoperasiannya telah ditutup beberapa tahun terakhir. Ini karena lembaga yang ditunjuk mengelola menelan kerugian dan diperparah lagi ketentuan pembelian bahan bakar terkesan sulit dipenuhi oleh nelayan dan pemilik kapal.

"Rapat terakhir di provinsi sudah ada keputusan di mana Juli 2018 ini PPI akan diambilalih. Kami

sudah siap menyerahkan data nilai aset dan kondisi setiap unit fasilitas di PPI itu sudah lengkap," jelasnya.

Menurut Arnika, selain kepastian pengalihan aset, pihak Pemprov dikabarkan mulai menyusun program perbaikan terhadap unit fasilitas yang rusak parah. Hanya saja, perbaikannya itu baru tahapan penyusunan DED. Meski demikian, pihaknya berharap, perbaikan fasilitas itu bisa dilakukan setelah PPI dikelola penuh oleh pemprov. "Kalau sudah diambilalih perbaikan itu ya kewenangan di provinsi dan memang dari rapat yang kami ikuti juga sudah disampaikan bahwa fasilitas penunjang di PPI itu akan diperbaiki," jelasnya.

Di sisi lain Arnika mengatakan, sejak kewenangan pengelolaan

kelautan diambilalih provinsi, Buleleng saat itu juga sudah mencabut keberadaan pengelola PPI yang sebelumnya dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pejabat dan pegawai kontrak di bawah UPTD tersebut juga sudah ditarik ke Dinas Perikanan. Saat ini hanya disisakan enam pegawai kontrak dan satu PNS yang masih ditugaskan di PPI sampai nantinya PPI diambilalih Pemprov Bali. Terhadap pegawai tersebut, Buleleng akan mengusulkan ke provinsi, agar pegawai tersebut dialihkan sebagai status pegawai pemprov. "Kalau UPTD sudah lama dicabut, tapi kita masih tugaskan satu PNS dan enam tenaga kontrak di sana. Nanti kita juga usulkan mereka dialihkan menjadi pegawai pemprov," jelasnya. k19

Edisi : Sabtu, 10 Maret 2018

Hal : 4



Diskan Bantu Nelayan 23 Jukung Fiber dan 24 Unit Mesin Tempel

MANGUPURA, NusaBali

Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Badung bakal menghibahkan 23 unit jukung fiber dan 24 unit mesin tempel kepada kelompok nelayan yang ada di Gumi Keris. Pemkab Badung menyiapkan anggaran Rp 1,4 miliar dalam APBD tahun 2018 demi merealisasikan program ini.

Pengadaan bantuan untuk nelayan itu telah masuk tahap tender di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Badung. Tender resmi dibuka pada 8 Maret 2018 dan akan ditutup pada 20 Maret 2018 mendatang.

Total ada sebanyak 23 unit jukung fiber ukuran 7 meter yang akan dihibahkan nanti. Termasuk sebanyak 24 unit mesin

tempel 15 PK.

Kepala Diskan Kabupaten Badung Putu Oka Swadiana saat dikonfirmasi membenarkan pengadaan sarana perikanan tangkap bagi nelayan. Dikatakan, pengadaan ini merupakan hibah yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

"Bantuan diberikan untuk meningkatkan produktivitas hasil tangkapan ikan. Kami harapkan nanti bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan," kata Swadiana, Minggu (11/3).

Mengenai anggaran pengadaan, menurut Swadiana yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Pertanian dan Pangan Badung, bersumber dari APBD Badung tahun 2018. Pagunya senilai Rp 1.410.000.000.

Hingga kemarin, sudah ada sekitar 13 rekanan yang menyatakan berminat atas tender tersebut. Pihaknya berharap tender bisa berjalan lancar. "Mudah-mudahan lancar tendernya, supaya penyerahan bantuan bisa cepat," tandasnya.

Untuk diketahui, kendati Kabupaten Badung menjadi daerah tujuan wisatawan dunia, namun pengembangan kawasan pesisir tak pernah dikesampingkan. Salah satunya sebagaimana berjalan selama ini, pemerintah secara berkala memberikan bantuan langsung kepada para nelayan berupa sarana perikanan tangkap. Di Badung kini tercatat ada sebanyak 1.825 orang yang bermatapencaharian sebagai nelayan. [asa](#)

Edisi : Senin, 12 Maret 2018

Hal : 2



Kejari Gianyar Atensi Dugaan Mark Up Bupati Cup

GIANYAR, NusaBali

Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar memastikan ada indikasi korupsi dalam kasus dugaan mark up dana Bupati Cup yang berlangsung tahun 2016 lalu. Kasi Pidsus Kejari Gianyar, Made Endra Arianto mengatakan sudah meningkatkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan.

"Saat ini masih pengumpulan berkas dokumen terkait," jelas Made Endra, Senin (12/3). Berkas-berkas dokumen ini penting untuk menentukan siapa tersangka di balik dugaan mark up dana ini.

Endra Arianto mengatakan sudah menggelar ekspose di internal Kejari Gianyar. Hasilnya, disimpulkan ada temuan dugaan pidana kasus yang dikelola PSSI

Gianyar itu. Dikatakan unsur pidananya sudah memenuhi untuk disidik. "Hasil pertimbangan dengan pimpinan, disepakati peningkatan kasus ini," tegasnya.

Dikatakan unsur dugaan korupsi dalam kasus ini berupa penyimpangan pengelolaan anggaran Bupati Cup tahun 2016 yang diterima dari APBD Kabupaten Gianyar. Namun seperti apa penyimpangan itu, Made Endra belum mau membeberkan. "Itu masuk ke ranah materi penyidikan, belum bisa kita beberkan," katanya.

Dikatakan seluruh bukti dugaan korupsi itu baru akan dibebaskan setelah penetapan tersangka. Namun ditegaskan saat ini pihaknya sudah mengamankan

sejumlah barang bukti berupa berkas dokumen. "Barang bukti ada beberapa dokumen kita dapatkan, dokumen itu masih dalam bentuk copynya, nanti dokumen aslinya juga kita amankan," katanya.

Made Endra pun mengaku sudah memiliki ancang-ancang menyeret oknum yang diduga tersangka dalam kasus ini. Namun dia mengaku masih mengumpulkan alat bukti yang lebih kuat untuk menetapkan tersangka. "Kita kuatkan alat bukti lagi untuk memastikan tersangka," katanya.

Hingga kini Kejari Gianyar sudah memeriksa 23 saksi yang diduga terkait dengan kasus ini. Mereka meliputi panitia hingga pihak swasta yang diduga terkait pengelolaan dana Bupati Cup. Semen-

tara pemeriksaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Lingkungan Pemkab Gianyar, Made Endra mengaku belum sejauh itu. "Kalau ke situ belum, mungkin nanti bisa merembet ke sana," ujarnya.

Disinggung adanya kemungkinan SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan) pada kasus ini seperti kasus KPPE Desa Lebih, Made Endra mengatakan untuk kasus ini pihaknya sudah melakukan antisipasi, agar tidak sampai terputus di tengah jalan. "Ini sudah kita antisipasi, kalau kemarin kan karena kerugian negaranya tidak bisa ditemukan, nah kalau kasus ini kita sudah melihat ada kerugian negara," ujarnya. nvi

Edisi : Selasa, 13 Maret 2018

Hal : 5



Kelian Banjar Ngaku Pungli Sejak 2012



Tersangka Nyoman Suarta

Tersangka juga manipulasi persyaratan bagi duktang yang mengurus KK tanpa surat pindah, seolah mereka tinggal di Banjar Margasengkala, Desa Bedulu dengan dibuatkan surat kontrak rumah

★ Duktang Urus KK Dipungut Minimal Rp 400.000

GIANYAR, NusaBali

Kelian Dinas Banjar Margasengkala, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, I Nyoman Suarta, 47, mengaku telah beraksi lakukan pungutan liar (pungli) pengurusan kartu keluarga (KK) sejak tahun 2012. Untuk mengurus penerbitan satu KK bagi penduduk pendatang, dipunguti

biaya kisaran Rp 400.000 hingga Rp 550.000.

Pengakuan oknum kelian banjar Nyoman Suarta---yang sebelumnya ditangkap Satgas Saber Pungli Kabupaten Gianyar melalui operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Desa Bedulu, 9 Maret 2018---ini diungkapkan Kasat Reskrim Polres Gianyar, AKP

Denny Septiawan, Senin (12/3). Menurut AKP Denny, Nyoman Suarta sudah sempat diperiksa, namun yang bersangkutan tidak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor, karena dianggap kooperatif.

AKP Denny menyebutkan, Sat-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1



Kasat Reskrim Polres Gianyar, AKP Denny Septiawan, tunjukkan BB pungli oleh oknum Kelian Banjar Margasengkala, Desa Bedulu, Nyoman Suarta, Senin (12/3).

Edisi : Selasa, 13 Maret 2018

Hal : 1



Sambungan...

Kelian Banjar Ngaku Pungli Sejak 2012

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

gas Saber Pungli Gianyar bergerak melakukan OTT di Kantor Desa Bedulu hingga menjaring oknum Kelian Banjar Nyoman Suarta, atas informasi masyarakat. Setelah cukup kantong bukti, Satgas Saber Pungli yang dikomandani langsung Kasat Reskrim Polres Gianyar AKP Denny pun menangkap pelaku di depan Kantor Desa Bedulu, Jumat siang pukul 11.30 Wita.

Tersangka Nyoman Suarta ditangkap bersama seorang wanita yang menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 untuk penerbitan KK atas nama Oktaf Daeng Sewang Solder, asal Kupang, NTT, yang tinggal di Banjar Margasengkala, Desa Bedulu. "Saat penangkapan, kita langsung dapatkan barang bukti berupa uang Rp 400.000, selembar KK atas nama Oktaf Daeng Sewang Solder, dan sebuah HP Huawei," jelas AKP Denny di Mapolres Gianyar, Senin kemarin.

Dari OTT itu, Satgas Saber Pungli langsung bergerak ke rumah pelaku Nyoman Suarta di Banjar Margasengkala, Desa Bedulu, untuk melakukan pengeledahan. "Di rumah pelaku, kita dapatkan tumpukan berkas KK," ujar mantan Kasat Reskrim Polres Bangli yang baru sebulan pindah ke Gianyar ini.

Dari tumpukan berkas-berkas itu, polisi baru berhasil menginventarisasi 10 lembar KK, termasuk mengecek keabsahan nomornya. "Nah, lembar 10 KK ini diakui sudah pernah diterbitkan oleh pelaku, sementara yang lain masih kita cek," kata AKP Denny.

Ada dua modus operasi yang

dilakukan oknum kelian banjar ini dalam pengurusan dan penerbitan KK. Pertama, untuk penduduk pendatang yang hendak menerbitkan KK dengan domisili di Banjar Margasengkala, Desa Bedulu dikenakan pungli kisaran Rp 400.000 hingga Rp 550.000. Kedua, untuk penduduk asli Banjar Margasengkala, cukup membayar Rp 50.000 sekali penerbitan KK.

Khusus untuk penduduk pendatang yang ingin menerbitkan KK, pelaku Nyoman Suarta juga memanipulasi persyaratan. "Seolah-olah warga tersebut berdomisili di Banjar Margasengkala, dengan dibuatkan surat kontrak rumah," katanya.

Uniknya, setiap membuat surat kontrak rumah itu, pelaku Nyoman Suarta selalu memakai rumahnya sendiri dengan masa kontrak minimal 5 tahun. Manipulasi data ini dibuat sebagai pengganti surat pindah domisili dari tempat asal penduduk pendatang. Pelaku memanfaatkan kondisi ini, karena penduduk pendatang biasanya malas mengurus surat pindah domisili. Mereka pilih cara praktis dengan memanipulasi rumah kontrak dan membayar sejumlah uang kepada oknum kelian banjar.

Menurut AKP Denny, penduduk pendatang yang diuruskan KK-nya oleh oknum kelian banjar ini justru sebagian besar tidak menetap di Gianyar, melainkan tinggal di kawasan Badung dan Denpasar. "Nah, alasan membuat KK di Gianyar, karena di sini dipermudah oleh pelaku. Jika di Denpasar, penduduk pendatang harus menyiapkan surat pindah

domisili. Mengurus surat pindah domisili itu ribet dan harus pulang kampung. Pelaku terkenal di kalangan penduduk pendatang berdasarkan cerita dari mulut ke mulut," terang AKP Denny.

Aksi pungli dengan menasar penduduk pendatang ini sudah dilakukan Nyoman Suarta selama 6 tahun sejak 2012. Selama itu pula, tersangka diduga telah menerbitkan ratusan KK yang disertai pungli dengan meraup lebih dari Rp 40 juta. Namun anehnya, pelaku justru mengaku baru menerbitkan 10 KK yang disertai pungli. "Ngakunya bersaksi sejak 2012, tapi baru terbitkan 10 KK. Ini sesuai barang bukti yang kita dapatkan," ujarnya.

AKP Denny menjelaskan, pihaknya masih melakukan pengembangan kasus ini, untuk mengetahui adanya keterlibatan oknum lain yang membantu penerbitan administrasi kependudukan ini. Buat sementara, pelaku Nyoman Suarta hanya dikenakan wajib lapor ke Mapolres Gianyar dua kali sepekan, Senin dan Kamis.

Kenapa pelaku pungli tidak ditahan? AKP Denny berdalih, pelaku tidak ditahan karena statusnya sebagai kelian banjar yang masih diperlukan oleh masyarakat. Lagipula, yang bersangkutan kooperatif. "Pelaku tidak ada indikasi menghilangkan barang bukti, karena semua sudah diamankan," katanya sembari menyebut pelaku dikenakan wajib lapor sampai proses penyidikan nanti berakhir.

Tersangka Nyoman Suarta sendiri disangka melanggar Pasal 95 B UU RI Nomor 24 Tahun 2013

tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara---

Sementara itu, Kepala Desa (Perbekel) Bedulu, Ketut Rinata, menyatakan Nyoman Suarta sudah dua periode menjabat Kelian Dinas Banjar Margasengkala (2006-2012, 2013-2019). Keseharian, oknum bersangkutan tak jauh berbeda dari kelian banjar lainnya di Desa Bedulu.

"Orangnya biasa saja, rajin ngurus administrasi kependudukan bagi warga yang tak bisa baca tulis maupun pendatang. Kadang juga ngurus surat pensiun bagi para lansia. Hampir semua klian juga seperti itu, melaksanakan tugas membantu warga," jelas Perbekel Ketut Rinata saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Senin kemarin.

Sedangkan informasi lain di lapangan menyebutkan, track record Nyoman Suarta dikenal buruk. Bahkan, oknum kelian banjar ini pernah 'dipecat' saat awal periode kedua masa jabatannya. Hanya saja, Perbekel Ketut Rinata enggan berkomentar tentang ini. "Bukan dipecat, hanya ditunda pelantikannya sebagai kelian periode kedua. Waktu itu, saya belum jadi Perbekel," kata Rinata.

Disebutkan, Nyoman Suarta mendapatkan suara terbanyak saat pemilihan periode kedua masa jabatannya sebagai kelian banjar. Namun, oleh Perbekel saat itu, yang bersangkutan justru tidak dilantik. "Lalu, diadakanlah pemilihan ulang. Ternyata dia unggul lagi dan akhirnya mau dilantik Perbekel (waktu itu) hingga menjabat sampai sekarang," katanya. nvi

Edisi : Selasa, 13 Maret 2018

Hal : 15



Korupsi APBDes Rp 149 Juta Divonis 1 Tahun, Perbekel Dencarik Langsung Terima

DENPASAR, NusaBali

Perbekel Dencarik, Banjar, Buleleng, Made Suteja, 53 dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (13/3). Terdakwa Suteja yang juga Ketua Forum Komunikasi (Forkom) Perbekel Buleleng ini terbukti melakukan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dencarik pada tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp 149 juta.



• NUSABALI/REZA

PERBEKEL Dencarik, Made Suteja usai divonis satu tahun dalam kasus korupsi APBDes di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (13/3).

Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim pimpinan Esthar Oktavi menyatakan terdakwa Suteja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dakwaan subsidair jaksa Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat 3 UU Tipikor jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Made Suteja, dengan pidana selama satu tahun, dan ditambah denda Rp 50 juta, subsidair empat bulan kurungan," tegas hakim.

Terdakwa sendiri sudah mengembalikan kerugian negara Rp 149 juta yang dititipkan di Kejar Buleleng. Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) IGN Widana menyatakan pikir-pikir. Apalagi sebelumnya, JPU menuntut terdakwa dengan hukuman 1,5 tahun penjara. Sementara Perbekel Dencarik, Suteja langsung menyatakan menerima. "Kami menerima putusan tersebut," ujar kuasa hukum terdakwa, Indah Elysa.

Dalam surat dakwaan jaksa dijelaskan, terdakwa Suteja diduga mengkorupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dencarik, pada tahun 2015 dan 2016 lalu. Dana yang diselewengkan besarnya mencapai Rp 149 juta. Angka itu berdasarkan akumulasi dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Made Suteja selaku Perbekel Dencarik. Rinciannya, uang dari sebagian penerimaan pendapatan desa yang tidak dipertanggungjawabkan dalam APBDes Rp 105.805.000, serta uang selisih pertanggungjawaban belanja desa setelah setoran pajak Rp 42.125.551. rez

Edisi : Rabu, 14 Maret 2018

Hal : 5